



## **Penerapan Sistem Suara Terbanyak pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 sebagai Perwujudan Demokrasi**

**Julita Situmorang\* & Tonny P. Situmorang**

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Diterima Maret 2017; Disetujui Mei 2017; Dipublikasikan Juli 2017*

---

### **Abstrak**

Di negara demokrasi, hal yang dianggap paling penting dan senantiasa menjadi perhatian adalah partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Hal tersebut merupakan keniscayaan, mengingat kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemilihan Umum sebagai salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara periodik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, merupakan implementasi dari partisipasi rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan kebijakan negara, melalui pemilihan para wakil rakyat untuk duduk di parlemen dan selanjutnya dilaksanakan oleh eksekutif atau pemerintah. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, Indonesia telah berulang kali melaksanakan Pemilihan Umum. Bila dihitung, setidaknya telah dilaksanakan 10 (Sepuluh) kali Pemilihan Umum yang memilih wakil rakyat dan Presiden. Pada tahun 2004, dilaksanakan pemisahan antar pemilihan Anggota Legislatif dengan Pemilihan Presiden. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan demokrasi, melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif 2009, dengan menerapkan sistem suara terbanyak untuk memilih anggota legislatif. Penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa pelaksanaan Pemilu legislatif Tahun 2009, guna mendapatkan gambaran nyata yang dijadikan bahan rujukan dan pengetahuan praktis oleh berbagai pihak.

**Kata Kunci: Demokrasi, Legislatif, Pemilu.**

### **Abstract**

*In a democratic country, the thing that is considered the most important and always of concern is people's participation in determining the direction of state policy. This is a necessity, given the position of the people as holders of sovereignty. General elections as one of the activities carried out by the government periodically based on the principles of democracy, is an implementation of people's participation. As the holder of sovereignty in determining state policy, through the election of representatives of the people to sit in parliament and subsequently carried out by the executive or the government. As a democracy based on Pancasila, Indonesia has repeatedly held General Elections. When calculated, at least 10 (ten) times the General Election has been held which elects the people's representatives and the President. In 2004, a separation between the selection of Legislative Members with the Presidential Election. The purpose of this paper is to determine the extent of the implementation of democracy, through the holding of the 2009 legislative elections, by implementing the most votes system to elect legislators. This writing is intended to analyze the 2009 legislative elections, in order to get a real picture that is used as reference material and practical knowledge by various parties.*

**Keywords: Democracy, Legislature, Election.**

**How to cite:** Situmorang, J. & Situmorang, T.P. (2017), Penerapan Sistem Suara Terbanyak pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 sebagai Perwujudan Demokrasi, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol 9, (2):

---

\*Corresponding author:

E-mail: [julitasitumorangusu@gmail.com](mailto:julitasitumorangusu@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai konsep ideal yang menjadi rujukan hampir semua negara dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganya, pada saat ini menjadi perhatian serius untuk dapat dilaksanakan oleh semua negara, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. Fenomena tersebut terjadi karena demokrasi diakui sebagai sistem yang paling sesuai dan paling mendekati idealita, bahwa negara pada hakekatnya adalah representasi kehendak rakyat.

Hal tersebut tentunya sangat beralasan karena untuk melaksanakan fungsi kedaulatannya rakyat harus ikut menentukan jalannya negara melalui proses pemilihan wakil - wakilnya di parlemen yang dilaksanakan melalui suatu Pemilihan Umum secara berkala atau periodik.

Banyaknya istilah demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, atau demokrasi Pancasila, namun demikian kesemuanya itu dimaksudkan untuk memberikan suatu jaminan bahwa negara tersebut menganut azas atau melaksanakan sistem demokrasi.

Pilihan terhadap demokrasi untuk dilaksanakan oleh negara-negara didunia saat ini semakin intensif. Apalagi setelah abad ke 19, yang kemudian semakin nyata saat ini, karena demokrasi telah menjadi bagian penting bagi sebuah negara dalam hubungan kerjasama antar negara, khususnya bagi negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. Disamping itu kepedulian rakyat terhadap hak - haknya, adalah termasuk dalam kategori Hak Azasi Manusia yang harus dihormati dan tidak dapat diabaikan oleh siapapun juga.

Indonesia sebagai negara yang memiliki Ideologi bernama Pancasila pada dasarnya telah merumuskan gagasan mengenai demokrasi dengan sebutan "kerakyatan" sebagaimana tercantum pada Pancasila. Adapun makna dari kerakyatan adalah bahwa Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai acuan dalam kehidupan bernegara diatas dasar keadilan. Oleh sebab itu berbagai hal menyangkut kepentingan rakyat dalam hubungannya dengan negara diatur berdasarkan tuntutan demokrasi sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Bagian dari tuntutan demokrasi di Indonesia yakni ketika dilakukan reformasi dan ditindak lanjuti dengan diundangkannya berbagai peraturan yang diselaraskan dengan tuntutan demokrasi seperti Pemilu, Otonomi Daerah dan sebagainya.

Sebagai bentuk komitmen demokrasi melalui reformasi pada tahun 1998, yang bertujuan menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar kepentingan rakyat. Kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan merupakan prinsip yang harus ditegakkan berdasarkan tuntutan demokrasi. Oleh sebab itu reformasi yang terjadi di Indonesia tidak semata - mata akibat krisis ekonomi semata, melainkan sebagai bentuk akumulasi tertekannya hak - hak rakyat pada masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat pada berbagai perubahan signifikan dibidang politik dan demokrasi serta Hak Azasi Manusia.

Dampak dari berbagai perubahan tersebut diatas adalah semangat keterbukaan dalam kehidupan demokrasi, dimana rakyat bukan lagi menjadi objek negara akan tetapi menjadi subjek. Termasuk partisipasi dan keikutsertaan rakyat dalam

lapangan politik secara lebih terbuka untuk menyalurkan aspirasi dan hak-hak yang dimilikinya, sebab inti demokrasi adalah menghormati hak yang dimiliki rakyat sebagai sesuatu yang hakiki.

Dalam konteks pelaksanaan demokrasi oleh suatu negara pada umumnya berhubungan dengan pergantian kepemimpinan secara berkala. Realitas demokrasi yang paling umum kita lihat adalah pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum (PEMILU), dimana rakyat menyalurkan aspirasi dan hak-hak yang dimilikinya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tanggungjawab untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintah pada masa berikutnya.

Menurut *International Commission of Jurists* mengenai sistem politik yang demokratis adalah "Suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas" (Budiardjo, 1992).

Setidaknya terdapat beberapa point penting menyangkut sistem yang demokratis dari pandangan diatas yakni: Hak rakyat dalam membuat keputusan politik, Pemilihan para wakil rakyat dan Proses pemilihan yang bebas.

Ketiga hal tersebut menggambarkan kedudukan rakyat dalam hubungannya dengan negara. Bila dikaitkan dengan Indonesia maka pada dasarnya sejak awal kelahirannya Indonesia telah memosisikan rakyat sebagai pementu kebijakan negara dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi telah mencantumkan

"Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" yang berarti bahwa prinsip demokrasi pada dasarnya bukan hal yang asing dalam sejarah kehidupan politik di Indonesia.

Bila kita telaah perihal kehidupan demokrasi di Indonesia, bahwa sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang semakin baik. Sejarah telah membuktikan bahwa implememntasi atau praktek demokrasi telah berlangsung melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, yang dilaksanakan pertama kali tahun 1955. Selanjutnya sejak tahun 1971 hingga saat ini dalam penyelenggaraannya dilaksanakan secara berkala lima tahunan sekali.

Meskipun kehidupan demokrasi di Indonesia mengalami banyak kemajuan bila dipandang dari sisi kuantitas, namun dalam konteks kualitas masih diperlukan analisis dan kajian lebih mendalam, termasuk berbagai perangkat aturan yang lebih komprehensif dan tuntas dalam mengakomodir berbagai kepentingan menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, sehingga aspek kebebasan, kejujuran, keadilan maupun fair play oleh penyelenggara senantiasa harus diupayakan untuk terwujudnya demokrasi yang dicita-citakan.

Dengan semakin maju dan meningkatnya pendidikan masyarakat pada umumnya tentu semakin membuka pemikiran dan rasa tanggungjawab terhadap bangsa dan negara. Bentuk tanggungjawab tersebut adalah melalui partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Oleh sebab itu Pemilu yang

dilaksanakan harus dapat memberi perubahan pada masyarakat secara nyata. Salah satu kemajuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia adalah ditetapkannya sistem suara terbanyak pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009. Keputusan tersebut dilaksanakan berdasarkan tinjauan terhadap UU No. 10 Tahun 2008 karena pada UU No.10 tersebut belum sepenuhnya mewakili aspirasi rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya. Maka untuk lebih memenuhi hakekat demokrasi dan aspirasi rakyat dilakukan perubahan terhadap salah satu pasal melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa calon legislatif terpilih sebagai wakil rakyat yang akan duduk di parlemen adalah yang memiliki perolehan suara terbanyak.

Dari perubahan sistem dalam menentukan wakil-wakil rakyat yang terpilih melalui suara terbanyak, tentu terdapat beberapa hambatan karena sistem tersebut relatif baru. Namun karena pemihakan yang tinggi terhadap kepentingan rakyat tentunya harus diapresiasi karena sangat berpengaruh bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Perubahan signifikan tersebut bermakna bahwa Indonesia telah membuktikan eksistensinya untuk sepenuhnya menjadi negara yang demokratis.

Dari uraian sebagaimana dikemukakan diatas perlu kiranya dianalisa lebih mendalam tentang aspek demokrasi menyangkut pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009. Pentingnya analisis tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran real dari berbagai aspek tentang Pemilu. Hal pokok yang perlu mendapat perhatian yakni proses penyelenggaraan, mekanisme dan berbagai implikasi yang timbul termasuk kesimpulan yang dapat

menjadi pegangan untuk penyempurnaan pelaksanaannya dimasa mendatang. Adapun yang menjadi kajian adalah sejauhmana respon rakyat bila dikaitkan dengan partisipasinya dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pengumpulan data yang diperoleh dari: *Library Research (Penelitian Kepustakaan)*, yaitu pengkajian terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 berdasarkan sumber tertulis dan sumber lainnya seperti buku-buku yang terkait dengan penulisan, Undang-Undang maupun bahan-bahan informasi yang diterbitkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang di dalamnya terdapat sejumlah objek yang dapat dijadikan sebagai sumber data yang dapat memberikan data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini populasi adalah yang terdaftar sebagai pemilih di Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipandang dapat mewakili populasi sebagai sumber data, semakin banyak sampel yang diambil akan diperoleh data yang semakin representatif. Dalam hal ini penulis menggunakan sampel wilayah dengan mengambil wakil dari setiap kelurahan 50 Orang.

Adapun pengambilan sampel disetiap kelurahan dilakukan dengan membagi jumlah lingkungan pada setiap kelurahan sehingga masing-masing lingkungan terdapat orang-orang yang

terpilih menjadi sampel, hal ini penulis lakukan guna mendapatkan data yang akurat dan valid serta representatif. Untuk seluruh Kecamatan Binjai Timur terdapat 7 (Tujuh) Kelurahan sebagai populasi maka total sampel adalah 350 Orang.

Adapun cara menentukan sampel tersebut dikenal dengan istilah sampel wilayah "Sampel wilayah adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi (Arikunto, 2006).

Untuk memperoleh data yang akurat perlu ditetapkan alat pengumpul data dimana dalam penulisan ini penulis melakukan dengan cara menyebarkan kuisioner atau angket sebagai alat pengumpul data yang berisikan pertanyaan - pertanyaan tertulis kepada responden yang terpilih sebagai sampel penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan angket berstruktur berbentuk pilihan berganda serta menggunakan skala penilaian.

Untuk mengolah data yang terkumpul sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan tahap pengorganisasian pengolahan data yang meliputi; 1) **Klasifikasi Data**, didapat dari jawaban responden yang terkumpul melalui angket yang diklasifikasikan dengan cara memberi kode pada jawaban responden, kemudian jawaban yang sama dikelompokkan menjadi satu. 2) **Tabulasi Data**, Setelah data diklasifikasikan, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan atau pentabulasian data pada tabel yang tersedia. 3) **Analisis Data**, Setelah pentabulasian data akan dapat diketahui ada tidaknya masalah atau besarnya setiap masalah yang ada. Untuk memberikan arti terhadap data yang

disajikan, maka data tersebut dianalisa dan diinterpretasikan. 4) Penghitungan dilakukan dengan frekwensi dari jawaban kemudian dimasukkan ke dalam skor bobot nilai dari opsi pilihan jawaban yang dilakukan adalah sebagai berikut: Jawaban a diberi nilai tiga; Jawaban b diberi nilai dua; Jawaban c diberi nilai satu

Teknik analisis data adalah cara untuk memudahkan atau menyederhanakan pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi untuk mengolah data kualitatif menjadi data kuantitatif (berbentuk angka). Untuk menghitung koefisien korelasi hubungan antara Penerapan sistem suara terbanyak terhadap pelaksanaan demokrasi dipergunakan rumus statistik Product Moment Pearson :

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$r$  = Korelasi ( hubungan )

$N$  = Jumlah Responden

$X$  = Skor Variabel Bebas yaitu Penerapan sistem suara terbanyak

$Y$  = Skor Variabel terikat yaitu Pelaksanaan demokrasi

Selanjutnya hasil yang diperoleh diuji dengan rumus t

$$t = \frac{r_{xy} \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - (r_{xy})^2}}$$

$t$  = Harga untuk sampai berkorelasi

$r$  = Koefisien korelasi

$n$  = Jumlah sample

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan bersumber dari data yang dihasilkan dari pertanyaan sebaran questioner, jumlah pertanyaan keseluruhan sebanyak 20,

setiap variabel masing - masing 10 pertanyaan dan masing - masing pertanyaan memiliki nilai berbeda yang perinciannya, Untuk jawaban a mempunyai skor 3, Untuk jawaban b mempunyai skor 2 dan Untuk jawaban c mempunyai skor 1

**Klassifikasi Frekuensi Jumlah Nilai Jawaban Responden Tentang Variabel X ( Sistem Suara Terbanyak )**

Nilai Jawaban	Kategori	Frekuensi	Persentase
28,38 - 30,05	Tinggi	196	56 %
26,68 - 28,37	Sedang	126	36 %
25,00 - 26,67	Rendah	28	8 %
<b>JUMLAH</b>		<b>350</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Jawaban Responden, Diolah.

Untuk Variabel Y berdasarkan perhitungan diperoleh gambaran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{Banyaknya Bilangan}} = \frac{30 - 23}{3} = 2,33$$

Tabel 11 Korelasi Produc moment Pearson

N	Σx	Σy	Σy <sup>2</sup>	Σy <sup>2</sup>	Σxy	Σ(X) <sup>2</sup>	Σ(Y) <sup>2</sup>
350	6960	6965	194320	195255	194700	48566961	48511225

Data selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus :

$$\Gamma_{xy} = \frac{n \Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{(n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2)(n \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)}}$$

$$\Gamma_{xy} = \frac{350 (194700) - (6969)(6965)}{\sqrt{\{350 \cdot 194320 - 48566961\}}}$$

$$(350 \cdot 195255 - 48511225)$$

$$\Gamma_{xy} = \frac{68145000 - 48539085}{\sqrt{(19445039)(19828025)}}$$

Selanjutnya lebar interval tersebut digunakan untuk membatasi 3 ( tiga ) kategori yang digunakan yaitu :

1. Kategori Tinggi = 27,68 - 30,01
2. Kategori Sedang = 25,34 - 27,67
3. Kategori Rendah = 23,00 - 25,33

Tabel 10 Klassifikasi Frekuensi Jumlah Nilai Jawaban Responden Tentang Variabel Y ( Wujud Demokrasi )

Nilai Jawaban	Kategori	Frekuensi	Persentase
27,68 - 30,01	Tinggi	280	80 %
25,34 - 27,67	Sedang	56	16 %
23,00 - 25,33	Rendah	14	4 %
<b>JUMLAH</b>		<b>50</b>	<b>100 %</b>

Sumber : data olahan jawaban Responden

Selanjutnya korelasi antara Penerapan system suara terbanyak dengan Demokrasi menurut rumus korelasi product moment pearson adalah :

$$\Gamma_{xy} = \frac{19605915}{\sqrt{385556719417975}}$$

$$\Gamma_{xy} = \frac{19605915}{19635598,27}$$

$$\Gamma_{xy} = 0,998$$

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa antara variabel bebas yaitu Sistem Suara terbanyak dengan variabel terikat yaitu wujud demokrasi adalah t, untuk dapat diketahui bahwa dari tabel Γxy pada N = 350 yaitu t.

Bahwa antara variabel bebas ( x ) dengan variabel terikat (y) efektifitasnya positif dalam kategori sangat kuat, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 12 Interpretasi Korelasi Product Moment

R	Interpretasi
0,80 - 1,000	Sangat Kuat
0,60 - 0,799	Kuat
0,40 - 0,599	Sedang
0,20 - 0,399	Ada/Rendah
0,00 - 0,199	Ada/Sangat Rendah

Sumber : (Sugiyono, 2003)

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, maka dilakukan uji t dengan rumus :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - (r)^2}}$$

t = Harga untuk sampai berkorelasi

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

$$t = \frac{0,998 \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - (0,998)^2}}$$

$$t = \frac{0,998 \sqrt{348}}{\sqrt{1 - (0,998)^2}}$$

$$t = \frac{0,998 \cdot 18,65}{\sqrt{1 - 0,996}}$$

$$t = \frac{18,61}{\sqrt{0,996}}$$

$$t = \frac{18,61}{0,997}$$

$$t = \underline{18.665}$$

Dari hasil uji t tersebut lalu dihitung apakah uji t lebih besar atau lebih kecil dari t tabel dengan anggapan dasar sebagai berikut :

$$N = 350$$

$$Dk = N - 2$$

$$Dk = 348$$

Selanjutnya untuk taraf signifikan 5 % dan derajat kepercayaan 95 % maka untuk dk 348 adalah t = 1,645. Dari hasil

pengujian ternyata t<sub>Hitung</sub> > dari t<sub>Tabel</sub> yaitu 18,665 > 1,645. Oleh karena itu H<sub>a</sub> diterima, dan hasil uji tersebut menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang kuat antara Sistem Suara terbanyak dengan Demokrasi.

Berdasarkan perhitungan yang ditunjukkan pada pada hipotesis uji di atas dapat dinyatakan bahwa t<sub>hitung</sub> jatuh pada daerah penolakan H<sub>0</sub>, maka hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh antara Sistem Suara terbanyak dengan Demokrasi. ditolak dan hipotesis alternatif diterima, maka hipotesis penelitian yang menyatakan sistem suara terbanyak adalah wujud demokrasi dapat diterima.

Oleh karena itu koefisien antara sistem suara terbanyak dengan demokrasi sebesar 0,998 adalah signifikan, artinya koefisien tersebut dapat digeneralisasikan karena hampir mendekati 1 atau 100 %, dalam artian bahwa di kecamatan Binjai Timur dimana sampel sebanyak 350 orang yang diambil dapat dijadikan rujukan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 di Kecamatan Binjai Timur cukup demokratis dalam artian bahwa demokrasi di kecamatan Binjai Timur telah terwujud.

## SIMPULAN

Pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari kepentingan rakyat untuk melaksanakan hak demokrasi dan kedaulatannya sebagai penentu arah dan jalannya negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemilu dan demokrasi adalah satu kesatuan yang saling terkait untuk menempatkan wakil-wakil rakyat dalam parlemen. Hasil penelitian dengan perhitungan r<sub>xy</sub> pada 0,998 berarti penerapan system suara terbanyak berada pada kategori kuat dan terbukti sebagai terwujudnya

demokrasi pada pemilu legislatif 2009. Dari hasil perbandingan, ternyata  $t_{Hitung} > t_{Tabel}$  yaitu  $18,665 > 1,645$  maka antara variabel bebas ( X ) dengan variabel ( Y ) adalah berada pada level yang kuat. Pengujian dengan rumus  $t$  membuktikan Sistem suara terbanyak merupakan wujud demokrasi yang memuaskan bagi rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Binjai Timur demokrasi telah terwujud.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sitepu, A.P. (2006). *Sistem Politik Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sanit, A. (1985). *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi Dan Demokratisasi*, Alih Bahasa I. Made Krisna, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Kusmanto, H. dkk. (2006). *Pengantar Ilmu Politik*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sunny, I. (1980). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru.
- Prihatmoko, J.J. (2007). *Mendemokratisasikan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, M. (1992). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Utama.
- \_\_\_\_\_, (1996). *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Utama.
- Wahidin, S. (2003). *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, M.S. (1981). *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kelima, Bandung: Alfabeta.
- Arifin, S. (1992). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera.
- Santoso, T. & Supriyanto, D. (2004). *Mengawal Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- UU No. 10 Tahun 2008 *Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD Prop, DPRD Kab./Kota*.
- UU No. 2 Tahun 2008 *Tentang Partai Politik*.
- <http://www.kabarindonesia.com/berita.php>
- [www.wikipedia/sejarah-demokrasi.com](http://www.wikipedia/sejarah-demokrasi.com)